

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Literatur Review**

Literature review merupakan uraian yang berisi teori, temuan dan bahan yang digunakan untuk penelitian sebagai acuan kegiatan penelitian. Dimana literature review berisi ulasan, rangkuman, maupun pemikiran penulis dari sumber pustaka yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Adapun beberapa literature penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan topik bahasan penelitian, akan dijadikan peneliti sebagai referensi dalam mendukung hasil penelitian. Berikut beberapa literature penelitian terdahulu :

Peneliti terdahulu terkait pembinaan wawasan kebangsaan sangat jarang ditemui, dalam disiplin ilmu administratif public. Sehingga peneliti melihat beberapa referensi peneliti terdahulu dari beberapa metode konsep Pendidikan wawasan kebangsaan kepada masyarakat, dan peserta didik. Selain itu terdapat beberapa penelitian yang lebih menekankan terhadap peran wawasan kebangsaan dalam mencegah disintegrasi bangsa. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang peneliti sajikan:

Peneliti menemukan kesamaan objek yang diteliti dalam skripsi Ilmu Pemerintahan. Universitas Maritim Raja Ali Haji, atas nama Julyara Azfina (2015), yang dimana dalam penelitian skripsi tersebut berjudul Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pemberdayaan Nasionalisme Pemuda Kepulauan Riau. Konsep yang digunakan dalam penelitian tersebut,

menggunakan pendekatan berbasis pemberdayaan, yang nantinya diiringi dengan pembinaan wawasan kebangsaan secara berkelanjutan.(Azfina, 2015)

Substansi dari hasil penjelasan temuan penelitian di lapangan dapat diketahui bahwasanya peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepulauan Riau masasih kurangnya dalam sensitifitas terhadap encegahan dini hal-hal yang mengancam keberlangsungan dalam bernegara. Bahkan untuk pemuda yang memiliki potensi saja misalnya yang telah mengikuti organisasi kepemudaan atau kemahasiswaan sulit untuk mendapatkan pemberdayaan oleh Kesbangpol Provinsi Kepri.

Pendekatan wawasan kebangsaan sebagai kajian penelitian juga terdapat pada Jurnal Penelitian Pendidikan, penelitiya adalah Budimansyah Dasim (2018). Penelitian tersebut lebih difokuskan dalam melihat Tantangan Globalisasi Terhadap Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Cinta Tanah Air di Sekolah. Sehingga dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan terhadap penelitian skripsi yang saya susun. Konsep yang digunakan dalam penelitian tersebut merupakan aspek globalisasi dalam perkembangannya terkait dengan disintegrasi bangsa, dan menemukan beberapa pengaruh budaya luar dalam menggerus budaya local.(Budimansyah Dasim, 2018)

Hasil dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwasanya, Globalisasi menantang kekuatan penerapan unsur jati diri bangsa Indonesia melalui agen budaya luar sekolah terutama media massa siswa lebih tertarik dengan budaya baru yang ditawarkan agen budaya luar sekolah terutama media televisi dibandingkan dengan budaya kita sendiri yang ditanamkan di sekolah. Adanya pertentangan antara nilai-nilai yang bersumber dari budaya adiluhung bangsa

Indonesia dengan nilai-nilai yang dibawa oleh agen globalisasi tersebut mengakibatkan terjadinya konflik nilai pada diri siswa.

Penelitian selanjutnya merupakan yang peneliti sajikan dari Rahma Danniarti (2017) yang dimana untuk melihat komponen terkait wawasan kebangsaan kepada generasi muda. Penelitian tersebut berjudul tentang Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Pendukung Tumbuh Kembang Wawasan Kebangsaan Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Smp Negeri 7 Palembang. Pada penelitian lebih difokuskan dalam pemahaman karakter pada Siswa SMP Negeri 7 Palembang pada pergaulan sehari-hari dilingkungan sekolah sudah menunjukkan hal-hal tersebut, yaitu individualistik, kepribadian dan keimanan semakin jauh, Kecenderungan semakin mudarnya Wawasan Kebangsaan tercermin dari perilaku hidup yang semakin memprihatinkan. Sentimen dan fanatisme suku, ras dan antargolongan semakin menonjol sehingga seringkali rentan terhadap terjadinya gesek-gesekan dan konflik bernuansa SARA diberbagai daerah. Sehingga peneliti tersebut menggunakan penelitian diskriptif kualitatif. (Rahma, 2017)

Implementasi Pendidikan wawasan kebangsaan dalam penelitian ini, memiliki kesamaan juga dengan penelitian Anis Madhan, (2017), Implementasi Wawasan Kebangsaan Di Pondok Pesantren Dalam Pembelajaran Sejarah Di Sma Al-Muayyad Surakarta Dan Sma Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta, perbedaan dari penelitian terletak pada lokasi, selain itu model dalam penerapan juga memiliki perbedaan. Adapun hasil dari penelitian Madhan adalah pembelajaran sejarah berbasis wawasan kebangsaan yaitu dengan menyusun perangkat pembelajaran berupa silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran

(RPP) yang memasukkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Sedangkan pelaksanaan pembelajaran sejarah berbasis wawasan kebangsaan dilakukan pendidik di SMA MBS melalui pemutaran film dokumenter sejarah perjuangan bangsa, tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan Bentuk penilaiannya tes dan non tes dengan mempertimbangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik siswa.(Anis, 2017)

Sedangkan dari penelitian terdahulu perihal terkait urgensi dari wawasan kebangsaan itu sendiri. Terdapat pada penelitian Suratmi (2016) tentang Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Karakter sebagai Landasan Wawasan Kebangsaan di SMK Negeri 1 Kendal Kabupaten Kendal. Pada penelitian tersebut menggunakan Kebijakan pendidikan karakter, implementasi, dan pelaksanaan belum terlihat di SMK Negeri 1 Kendal untuk menjawab tantangan globalisasi dan industrialisasi dalam perubahan budaya pada anak usia sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Lokasi penelitian di SMK Negeri 1 Kendal Kabupaten Kendal, Adapun peneliti tersebut menggunakan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi, dengan informan terdiri atas tiga kelompok, yaitu pengelola sekolah, guru, dan siswa. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) kebijakan Pendidikan karakter yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Kendal dilaksanakan sesuai dengan keinginan bersama warga sekolah yang diwujudkan melalui SK Kepala Sekolah. Pendidikan karakter diwujudkan dalam budaya 5S seperti senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, (2) pelaksanaan pendidikan karakter dilakukan melalui pembiasaan dengan memberikan teladan oleh guru kepada siswanya.(Sutarmi, 2016)

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Muya Barida (2017) Universitas Ahmad Dahlan , dengan judul Inklusivitas Vs Eksklusivitas: Pentingnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan Dalam Mewujudkan Kedamaian Yang Hakiki Bagi Masyarakat Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah terkait pelanggaran isu sara, selain itu peneliti tersebut mendefinisikan Inklusivitas merujuk pada sikap inklusif, sementara eksklusivitas merujuk pada sikap eksklusif. Sikap merupakan kecenderungan dalam bertindak yang dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan terhadap suatu objek. (Muya, 2017)

Penelitian tersebut secara hasil menemukan formulasi terkait penerapan wawasan kebangsaan yang dimana ditempuh dengan berbagai daya upaya antara lain melalui pendidikan informal, dari lingkup keluarga. Orangtua memberikan wawasan kebangsaan sejak dini. Pendidikan formal dengan memasukkan kurikulum yang memuat wawasan kebangsaan, antara lain Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Sejarah, dan Pendidikan Humaniora. Wawasan kebangsaan juga dapat dikembangkan melalui lagu-lagu kebangsaan atau hasil seni dan budaya bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan yang berkembang dengan baik, menciptakan rasa cinta terhadap perbedaan yang ada, baik berbeda dalam ras, suku, bahasa, budaya dan agama. Perbedaan akan dipandang sebagai suatu keragaman, bukan sebagai ancaman yang membuat perselisihan, permusuhan, dan peperangan. Masyarakat Indonesia dapat merasakan kondisi yang penuh penerimaan, ketenangan, kenyamanan, keamanan yang terkait dengan diri secara personal maupun social.

Peneliti juga mengambil penelitian terdahulu dari thesis, yang dimana kondisi tersebut dilakukan mengingat kurangnya literasi terkait penelitian yang

linier dengan disiplin ilmu. Penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Mellinda Fatimah, (2019) dalam penelitian tersebut berjudul Literasi Digital Dalam Meningkatkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Dalam Pembelajaran Ppkn Era Revolusi Industri 4.0 : Studi Deskriptif Pada Peserta Didik Kelas X Sma Laboratorium Percontohan Upi Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, skala likert dan studi dokumentasi.(Fatimah Melinda, 2019)

Hasil penelitian tersebut Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Proses penerapan literasi digital dalam pembelajaran PPKn membutuhkan perencanaan dan persiapan yang baik; (2) Hasil peningkatan pemahaman peserta didik terkait wawasan kebangsaan melalui pembelajaran PPKn dengan menerapkan literasi digital dapat dikategorikan “sangat baik” secara berkelompok maupun individu; (3) Kurangnya kemampuan sumber daya manusia dan belum maksimalnya pengadaan serta peremajaan sarana dan prasarana dapat menghambat penerapan literasi digital dalam pembelajaran. Sehingga dalam saran peneliti kedepannya dalam pemahaman siswa perlu ditingkatkan terkait penggunaan metode pembelajaran dalam pemahaman wawasan kebangsaan.

Pendekatan pemahaman terkait wawasan kebangsaan juga menjadi subjek penelitian dari Sri Suneki dkk (2016), yang berjudul Oreorientasi Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Dalam Mencegah Disintegrasi Bangsa Bagi Generasi Milenial (Studi Kasus Di Smk Pelita Nusantara 2 Semarang. Dalam penelitian tersebut lebih menekankan pada tekanan peradaban dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. yang ditandai dengan berkembangnya internet *off/for things*

yang kehadirannya begitu cepat tentu dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi generasi millennial. Sehingga pendekatan tersebut memiliki nilai kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, sementara hasil dari penelitian tersebut didapatkan permasalahan terkait bahwa adanya upaya peningkatan reorientasi kesadaran bela negara bagi generasi millennial di sekolah melalui kegiatan sosialisasi, implementasi bela negara dalam pembelajaran, ekstrakurikuler serta melalui habituasi. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa peningkatan bela negara merupakan satu hal yang urgen dan menjadi satu keharusan yang membumi di kalangan generasi millennial. (Sunek, 2016)

Berdasarkan dari serapan beberapa *literature review* yang dimana memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu. Peneliti mengambil beberapa referensi untuk dijadikan pijakan teori, adapun perbedaan dari beberapa penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti adalah, terkait dengan lokasi yang diteliti. Dimana lokasi yang akan diteliti adalah disalah satu Instansi Pemerintah Kota Batu. Sehingga luaran yang akan dihasilkan nantinya akan mempengaruhi, adapun beberapa konsep yang dijadikan peneliti untuk memperkuat alat analisis sebagai berikut :

## **2.2 Pembinaan Wawasan kebangsaan**

Mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional merupakan semangat Nasionalisme yang tinggi demi tercapainya tujuan nasional, merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham dan semangat kebangsaan dalam jiwa kita sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan kebangsaan (nusantara).

Sehingga pemahaman terkait wawasan kebangsaan di lingkungan masyarakat dan bernegara menjadi sangatlah penting dalam mewujudkan keberlangsungan sosial.

Prof. Muladi, Gubernur (Lemhannas RI 2005-2011), menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.

Istilah Wawasan Kebangsaan terdiri dari dua suku kata yaitu “Wawasan” dan “Kebangsaan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinyatakan bahwa secara etimologis istilah “wawasan” berarti: (1) hasil mewawas, tinjauan, pandangan dan dapat juga berarti (2) konsepsi cara pandang. Sedangkan “Kebangsaan” berasal dari kata “bangsa” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan “kebangsaan” mengandung arti (1) ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, (2) perihal bangsa; mengenai (yang bertalian dengan) bangsa, (3) kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. (Suhady, 2006)

Konsep tersebut bersifat idiologis dan disosialisasikan kepada setiap anggota (warga) negara. Nasionalisme dan wawasan kebangsaan mengikat warga negara dalam beberapa hal, yakni (a) memiliki kesadaran sebagai satu bangsa, yang dapat memperkuat rasa kebangsaan, persatuan dan kesatuan, (b) jiwa, semangat, dan nilai-nilai patriotik, yang berkaitan dengan perasaan cinta tanah air, cinta kepada tanah tumpah darah, cinta kepada negara dan bangsa, cinta kepada milik budaya bangsa sendiri, kerelaan untuk membela tanah airnya, (c) jiwa, semangat dan nilai-nilai kreatif dan inovatif, dan (d) jiwa, semangat, dan nilai-nilai yang mampu membentuk kepribadian, watak dan budi luhur bangsa. (Mustopo, 1983)



Wawasan kebangsaan dapat juga diartikan sebagai sudut pandang/cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal.(Suhady, 2006) Sementara itu dalam tataran kontekstual, nasionalisme Indonesia merupakan kehendak untuk membangun sebuah dunia yang di dalamnya manusia Indonesia.

Dengan demikian wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan menentukan bangsa menempatkan diri dalam tata berhubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa lain di dunia internasional. Wawasan kebangsaan mengandung komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa dan menghendaki pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan masa mendatang serta berbagai potensi bangsa.

### **2.2.1 Nasionalisme**

Istilah nasionalisme dalam kamus perpolitikan di Indonesia diduga baru muncul setelah Samanhudi menyerahkan tampuk kepemimpinan Sarekat Islam kepada H.O.S Tjokroaminoto pada pertengahan 1912. Kemudian disusul Indische Partij yang mendengungkan nasionalisme menentang penetrasi asing yang dipelopori Douwes Dekker dengan Perhimpunan Indonesia. Nasionalisme sering kali dikonotasikan dengan aspek-aspek emosional, kolektif dan idola serta sarat emosi historis.

Adapaun faktor lain yang mempengaruhi Nasionalisme, yang dikemukakan oleh Stanley Benn yang dimana mengungkapkan bahwa nasionalisme memiliki bagian-bagian seperti dibawah ini, yaitu :

1. Semangat ketaatan kepada suatu bangsa (semacam patriotisme).
2. Dalam aplikasinya kepada politik, nasionalisme menunjuk kepada kecondongan untuk mengutamakan kepentingan bangsa sendiri, khususnya jika kepentingan bangsa itu berlawanan dengan kepentingan bangsa lain.
3. Sikap yang melihat amat pentingnya penonjolan ciri khusus suatu bangsa. Karena itu, doktrin yang memandang perlunya kebudayaan bangsa dipertahankan.
4. Ada kriteria yang jelas untuk mengenali suatu bangsa beserta anggota para bangsa itu. (Ghazali, 2005)

Sedangkan pandangan dari H.A.R. Tilaar berpendapat ada beberapa faktor penting dalam menumbuhkan nasionalisme. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah bahasa, budaya dan pendidikan. Pendapat yang sejalan juga hadir dari tokoh besar di kalangan mahasiswa yakni Nurcholish Madjid, dimana mengungkapkan jiwa nasionalisme dapat dibentuk berdasarkan prinsip prinsip nasionalisme yaitu :

1. Kesatuan (*unity*), yang mengubah hal-hal yang polimorfik menjadi monomorfik sebagai produk proses integrasi;
2. Kebebasan (*liberty*), khususnya bagi negeri-negeri jajahan yang memperjuangkan pembebasan dan kolonialisme;

3. Kesamaan (*equality*), sebagai bagian yang termasuk dari masyarakat demokratis yang merupakan permasalahan dari masyarakat kolonial yang diskriminatif dan otoriter;
4. Kepribadian (*identity*), yang lenyap karena negasi kaum kolonial; dan
5. Prestasi amat diperlukan untuk menjadi sumber inspirasi dan kebanggaan bagi warga negara nasional

Saat ini disinyalir bahwa nasionalisme Indonesia rapuh dalam menghadapi gejala-gejala terbaru berupa solidaritas parokial dan kekuatan dari luar akibat pengaruh globalisasi, baik kekuasaan kolonial, penetrasi *transnasional corporation*, *multinasional corporation*, maupun lembaga- lembaga internasional lainnya. Selain itu, menurut Barbara Goodwin. *Pertama*, basis nasionalisme atau identitas nasional. *Kedua*, fragmentasi atau konflik yang terjadi. *Ketiga*, loyalitas yang berlapis. *Keempat*, sirkulasi antara identifikasi subjektivitas individu dan masyarakat yang sifatnya *voluntaris* atas keberadaan suatu *nation*.

### **2.3 Disintegrasi Bangsa**

Negara Indonesia terbentuk dari sebuah entitas diatas kemajemukan, perbedaan ras, suku dan budaya. Kemajemukan tersebut menjadi salah satu factor terbentuknya negara Indonesia. Adapun keadaan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari pandangan Furnval terkait kemajemukan, yakni masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk (*plural society*), yakni suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam satu kesatuan politik”.

Hal ini sejalan dengan pandangan terkait konsep negara dari Presiden Republik Indonesia Pertama Ir. Soekarno :

Bahwa *Nationale Staet* Indonesia berdiri di atas satu kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai ke Irian. Indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah negara-bangsa. Karena terdiri dari kemajemukan suku bangsa yang dibingkai dalam kesatuan dan persatuan.

Kondisi struktur masyarakat Indonesia yang majemuk telah berdampak pada persoalan intergrasi pada tingkatan nasional. Pluralitas masyarakat yang bersifat multidimensional itu tidak jarang menghadirkan persoalan tentang bagaimana masyarakat Indonesia terintegrasi secara horizontal. Sehingga kemajemukan bangsa Indonesia dapat menyebabkan konflik horizontal yang berujung pada ancaman disintegrasi bangsa.

Menurut F.M. Suseno ada beberapa hal yang menyebabkan maraknya fanatisme sehingga pecahnya integrasi nasional. *Pertama* ialah masalah sentralisme, yang *kedua* ialah masalah primordialisme, dan yang *ketiga* adalah permasalahan ketidakadilan sosial. (Rhicard, 2003)

Permasalahan tersebut menurut Richard M Daulay, dapat dicegah melalui *pertama*, dengan memperkuat kembali Pancasila sebagai sebuah ideologi nasional yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. *Kedua*, menciptakan keadilan sosial dan pemerataan antara pusat dan daerah. *Ketiga*, membangun budaya Indonesia yang akan menyatukan seluruh elemen bangsa. *Keempat* ialah pelaksanaan otonomi daerah yang benar dan tepat.

Strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah hal tersebut ialah sesuai dengan H.A.R. Tilaar ialah memperkuat kembali peranan budaya, bahasa dan pendidikan sebagai penopang bagi berkembang dan tumbuhnya nasionalisme.

1. Melalui budaya dapat dilihat bahwa penguatan kebudayaan nasional yang didasarkan atas budaya lokal akan memperkokoh diri dalam hal menangkal eksese buruk modernisasi dan globalisasi.

2. Penggunaan bahasa nasional juga sangat penting dalam hal menunjukkan dan menumbuhkan identitas bangsa. Seperti ungkapan yang menyatakan bahwa bahasa menunjukkan bangsa.
3. memperkuat dan memvitalkan kembali pendidikan nasional sebagai poros utama dalam pembentukan identitas. Pendidikan nasional, walaupun berwawasan global dan bercirikan nilai-nilai modern, juga harus didasarkan akan nilai-nilai atau ciri nasional. Sehingga kepribadian (sebagai ciri identitas) akan tertanam, sehingga kemudian ancaman modernisasi dan globalisasi dapat kita minimalisir. (H.A.R. Tilaar, 2007)

Artinya secara sederhana dapat dikatakan ada dua hal yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut. Pertama, secara politis (*structural*) dan yang kedua ialah secara sosial (*cultural*). Secara struktural diharapkan pemerintah dapat membuat dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat dikatakan merata dan tidak membuat kecemburuan antar suku bangsa. Sedangkan secara kultural bahwa diharapkan masyarakat sebagai sebuah kesatuan dapat secara aktif mengeratkan diri melalui budaya lokal yang dapat menjadi penyangga bagi kesatuan nasional.

#### **2.4 Peran Kesbangpol Kota Batu dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan**

Peran pemerintah diharapkan semaksimal mungkin dalam menciptakan kesatuan dan persatuan, guna menjaga negara agar tidak mengalami disintegrasi bangsa, yang dimana dapat mengancam kedaulatan dan keutuhan negara. Terkait hal ini peneliti melihat peran Pemerintah Kota Batu dalam menciptakan keadaan social dilingkungan masyarakat Kota Batu khususnya dilingkup generasi muda dalam pemahaman wawasan kebangsaan (Nasionalisme). Perlu diapresiasi

langkah Pemerintah Kota Batu dalam usaha menciptakan peningkatan pemahaman terkait wawasan kebangsaan di atur tersendiri dalam Peraturan Wali Kota Batu No 48 Tahun 2013 Tentang Penjabaran tugas dan fungsi kesbangpol dimana Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Harus Melakukan Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Ketahanan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara.

Sehingga peneliti melihaat akan melihat sejauh mana pelaksanaan dan keberhasilan dalam melakukan pembinaan wawasan kebangsaan yang telah diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota Batu No 48 Tahun 2013 tersebut. Menurut Grindle suatu kebijakan berhasil atau tidaknya dapat diukur melalui hasil pencapaian tujuan program.(Grindle, 1980)

Peneliti menggunakan pendekatan untuk melihat implementasi melalui menjadi dua bentuk, yaitu :

1. Segi proses, dimana melihat bagaimana pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan pada Generasi Muda
2. Ketercapaian tujuan, dimana memiliki dua indicator berupa hasil, dampak kebijakan Pembinaan Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda, serta perubahan apa yang terjadi dilapangan terkait dengan kelompok sasaran.

Selain itu, proses implementasi merupakan suatu serangkaian aktivitas penting yang sangat kompleks. Pertama, implementasi berkaitan dengan akumulasi dan akuisisi sumberdaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan suatu program. Sumber daya tersebut meliputi beberapa aspek yaitu, personil, perlengkapan, material dan yang penting uang atau anggaran.

Atau meminjam terminologi Christopher Hood, proses kebijakan (terutama formulasi dan implementasi) perlu ditunjang oleh berbagai perangkat pemerintah (tools of government) yang disingkatnya dengan NATO, yaitu *Nodality* (informasi), *Authority* (otoritas), *Treasure* (anggaran), dan *Organization* (kelembagaan/organisasi). (Hood, 2007)

Melalui pendekatan Menurut Christopher Hood ingin melihat upaya pemerintah Kota Batu dalam pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan yang dilakukan kepada kaum muda, melalui pendekatan penggabungan teori NATO. Penggunaan instrument ini ditekankan untuk melihat sebuah upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Batu, dalam menciptakan sikap nasionalisme yang tinggi melalui pembinaan wawasan kebangsaan. Selain itu dikarenakan memiliki kesamaan dengan teori implementasi yang dipakai sebelumnya dari Grindle. Pada dasarnya pemerintah mempunyai 4 (empat) sumberdaya atau instrument yang dapat Pemerintah mereka gunakan dalam menjamin pelaksanaan program salah satunya pembinaan wawasan kebangsaan, diantaranya, *nodality*, *authority*, *treasure*, dan *organization* (atau biasa disingkat menjadi NATO). (Hood, 2007)

### **1. Nodality**

*Nodality* merupakan posisi sentral pemerintah dalam jaringan informasi masyarakat yang bisa digunakan melalui pesan, seperti pemberitahuan, pengumuman publik. Faktor yang mencakup kejelasan isi kebijakan, sosialisasi kebijakan, dan penerimaan terhadap kebijakan. *Nodality* digunakan melalui penyaluran pesan seperti pemberitahuan atau pengumuman ke publik yang menjelaskan konten dari kebijakan. Dengan adanya *nodality* pemerintah mampu menggunakan informasi dalam menyampaikan kebijakannya kepada masyarakat dan digunakan untuk mengubah perilaku institusi sosial yang ada. Oleh karena itu, pemerintah

harus dapat memastikan informasi itu memang dibutuhkan oleh berbagai pihak yang dituju oleh kebijakan.

## 2. Authority

*Authority* merupakan otoritas yang menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kekuatan hukum yang resmi untuk menuntut, melarang, menjamin, atau mengadili. Selain itu pemerintah juga mempunyai kemampuan untuk memfasilitasi, *atau* menerbitkan peraturan administrative, atau dengan menguasai sumberdaya melalui pajak. (Margetts, 2009) Otoritas inilah yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan perilaku masyarakat selaku objek kebijakan. Atau dengan kata lain *authority* (kewenangan) merupakan tanggung jawab pemerintah untuk melakukan pengawasan untuk mengawal agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan.

## 3. Treasure

*Treasure* atau yang berarti harta adalah sebuah sesuatu yang dimiliki pemerintah berupa benda atau jasa yang diberikan kepada masyarakat dari pemerintah. *Treasure* juga mengindikasikan adanya ketersediaan dana atau benda bernilai lainnya dan pemerintah bisa menggunakannya untuk meraih tujuan kebijakan yang dibuat pemerintah. Penggunaan resources memiliki peran cukup penting dalam menjalankan kebijakan, dengan memaksimalkan sumberdaya ini diharapkan tujuan kebijakan juga mudah untuk dicapai. Dalam pengoptimalan implementasi kebijakan Pembangunan Pasar Mejayan Baru Pemerintah harus



mengupayakan kekuatan dengan segala fasilitas untuk mencapai tujuan kebijakan.

#### 4. **Organization**

Organisasi sebagai sumberdaya dapat digunakan dalam apa yang disebut sebagai '*treatments*', yaitu penggunaan upaya masyarakat dan kemampuan material lainnya dari organisasi tersebut. Organisasi yang dijalankan pemerintah berupa sumberdaya yang mampu digunakan untuk mengontrol perilaku masyarakat. Sumberdaya ini tentunya juga dibarengi dengan kualitas dan kuantitas yang memadai sehingga mampu melaksanakan dan mencapai tujuan kebijakan.

Pada dasarnya kebijakan akan dapat dikatakan berhasil apabila dalam proses tidak menuai permasalahan, dan jelas akan berdampak pada hasil atau tujuan yang telah di tetapkan. Dalam hal pembinaan wawasan kebangsaan ini , akan melihat bagaimana strategi dan upaya Pemerintah Kota Batu dalam mewujudkan pemahaman yang baik terkait wawasan kebangsaan bagi generasi muda.

